

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi penagihan piutang kategori non pemerintah pada BPJS Kesehatan KC Solok, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagian dari sistem informasi akuntansi penagihan piutang kategori non pemerintah pada BPJS Kesehatan KC Solok adalah : fungsi dan jabatan yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dokumen-dokumen yang diperlukan, prosedur penagihan piutang beserta flowchart yang menggambarkan prosedur tersebut, ancaman dan pengendalian internal yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Solok.
2. Fungsi dan jabatan yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi penagihan piutang kategori non pemerintah pada BPJS Kesehatan KC Solok meliputi : bidang Penagihan dan Keuangan, bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan (PPK), bidang Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan (KPP), Kepala Cabang dan kader JKN.
3. Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi Nomor *Virtual Account* (digunakan pada saat mengunduh jumlah tagihan), Data tagihan PPU BU dan PBPU, Form tagihan PPU BU dan PBPU, Laporan badan usaha menunggak, Berita acara upaya penagihan,

Laporan ketidakpatuhan badan usaha, Daftar BU yang akan direkonsiliasi, Data BU (digunakan pada saat rekonsiliasi), Data tagihan setelah rekonsiliasi, Daftar BU yang sudah non aktif, Rekap metode upaya penagihan yang akan dilakukan, Daftar peserta yang tidak dapat dihubungi dan Laporan evaluasi hasil tagihan PBPB.

4. Seluruh prosedur sistem informasi akuntansi penagihan piutang kategori non pemerintah pada BPJS Kesehatan KC Solok digambarkan secara sistematis dengan menggunakan flowchart terlampir.
5. Dalam penagihan piutang kategori non pemerintah BPJS Kesehatan KC Solok terdapat beberapa ancaman yang harus dihadapi yaitu : Data tagihan iuran PPU BU tidak valid dan akurat, informasi peserta tidak lengkap dan benar, terjadinya kesalahan pada saat menghitung tagihan iuran peserta, tingkat kesadaran peserta rendah dalam membayar iuran, pada saat dilakukan penagihan peserta tidak mengaku menjadi peserta BPJS Kesehatan, serta peserta berada dalam kondisi kesulitan finansial sehingga sulit untuk melaksanakan kewajibannya.
6. Untuk mengatasi ancaman tersebut, BPJS Kesehatan KC Solok melakukan beberapa pengendalian internal, meliputi : memvalidasi semua data yang diinputkan oleh peserta, melakukan rekonsiliasi ulang data peserta dengan kebijakan iuran sehingga tidak ada

kesalahan pada saat penghitungan tagihan, memberikan edukasi terkait pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan, dan memberikan sanksi jika peserta menunggak iuran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka saran-saran membangun yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. BPJS Kesehatan KC Solok semakin giat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi BPJS Kesehatan.
2. BPJS Kesehatan dapat menyusun strategi baru untuk mengatasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh peserta, baik itu PPU BU maupun PBPU.

